

**PELATIHAN AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID DI
MASJID AL-MUSLIMIN, MEDAN**

***TRAINING ON ACCOUNTABILITY AND FINANCIAL MANAGEMENT OF MOSQUES
AT AL-MUSLIMIN MOSQUE, MEDAN***

Ikhwan Lubis

Universitas Budi Darma, Medan
Korespondensi Penulis: ikwanlubissemm@gmail.com

M. Sianturi

Universitas Budi Darma, Medan
Email: maringansianturi1966@gmail.com

AM Hatuaon Sihite

Universitas Budi Darma, Medan
Email: anggiatsihite282@gmail.com

Edizal Hatmi

Universitas Budi Darma, Medan
Email: hatmi1976@gmail.com

Ilhamsyah

Universitas Budi Darma, Medan
Email: ilhamsyahprof80@gmail.com

Article History:

Received: 20 Mei 2022
Revised: 19 Juni 2022
Accepted: 15 Juli 2022

**Keywords: Transparency,
Accountability, Accounting
In Mosques**

Abstract: *This study aims to find out that the administrators of Masjid Al Muslimin' carry out accounting practices and Islamic theology correctly. About how mosque administrators disclose and report all activities related to mosque financial management and whether mosque administrators carry out the management of mosque finances in an accountable manner to worshippers.*

This type of research uses a qualitative type of research. The type of data used in this study was primary data obtained directly with the speakers, namely the mosque administrators and worshippers of Masjid Al Muslimin'. Data sources are derived from interviews, documentation, and observations. The analysis technique used is Logic Analytic, which is to adjust various observations with interviews with the theories used in this study.

The results of this study the accounting practices used in Masjid Al Muslimin' are very simple but the administrators really maintain the mandate that has

been given by the pilgrims to manage the mosque finances well to the administrators. Although the pilgrims have great confidence in the administrators, in practice the administrators are still accountable (accountability) with what is done and open (transparency) in terms of delivery and recording. In addition, the rule of law of islamic teachings must be the standard basis for carrying out accountability.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui para pengurus Masjid Al Muslimin' menjalankan praktek akuntansi dan teologi islam dengan benar. Tentang bagaimana pengurus masjid mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid dan apakah para pengurus masjid menjalankan pengelolaan keuangan masjid secara akuntabel kepada para jamaah.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis pengabdian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam pengabdian ini data primer yang didapatkan langsung dengan narasumber yaitu para pengurus masjid dan jamaah Masjid Al Muslimin'. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa yang digunakan yakni Logic Analytic, yakni menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dengan wawancara dengan teori yang digunakan dalam pengabdian ini.

Hasil dari pengabdian ini praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Al Muslimin' sangat sederhana namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi Di Masjid

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Stanbury, 2003) dalam (Mardiasmo, 2006).

(Libby dan Luft, 1993) dalam (Silvia 2011), menyatakan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan seseorang, seseorang dengan akuntabilitas tinggi tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya. Kondisi yang memungkinkan lemahnya pertanggungjawaban serta transparansi juga terdapat pada organisasi pemerintahan maupun swasta, sehingga dengan permasalahan tersebut membuat karyawan/pegawai tidak konsisten dengan pekerjaan dan aturan yang mengikat.

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Kristen, Katolik, Budha, Hindu? Pertanyaan ini begitu menggelitik, karena agama sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan, hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan, prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang didasarkan pada syariah Islam) atau akuntansi Kristen atau akuntansi Hindu dan lainnya wajar saja dipertanyakan orang (Bastian, 2007),.

Pengabdian ini mengacu pada pengabdian yang telah dilakukan (Simanjuntak dan Januari, 2011) yaitu Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (studi kasus di Masjid Baitusalam Ketapang). Sedangkan tim sekarang mengganti pengabdian untuk dijadikan objek. Sehingga tim sekarang mengembangkan dan merubah lokus menjadi **“Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid (studi kasus di Masjid Al-Muslimin)”**.

1. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Pentingnya kemampuan mengelola keuangan masjid secara Akuntabilitas pada Masjid Muslimin di Kec. Medan Tuntungan, itulah hal yang harus dimiliki dan dipahami oleh para pengurus Badan Kebaziran Masjid, Al-Muslimin Kec. Medan Tuntungan dikarenakan kemampuan dalam pengelolaan Masjid yang akuntabilitas merupakan salah satu syarat untuk membangun kepercayaan anggota masjid karena menyangkut masalah yang berhubungan dengan uang.

Dari identifikasi masalah-masalah yang telah diteliti dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Masjid dijalankan karena selama ini system pengelolaan Masjid masih sangat sederhana penerimaan dan pengeluaran diumumkan saja tanpa melakukan system pencatatan Akuntansi secara continue hal ini mengakibatkan tidak Akuntabilitasnya Pengelolaan Keuangan Masjid dan akibatnya kurang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Kenaziran Masjid.
2. Untuk mencari solusi di atas, maka diadakan pelatihan peningkatan kemampuan Akuntabilitas dan Pengelolaan Masjid di Kec. Medan Tuntungan, pelatihan ini akan diadakan pada bulan Agustus 2022.

2. Permasalahan Mitra

Yang menjadi permasalahan pada Badan Kenaziran Masjid, Kec. Medan Tuntungan adalah :

1. Badan Kenaziran Pengurus Masjid masih terlalu minim pengetahuan dan pengalaman tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Masjid.
2. Kurangnya kepedulian pengurus untuk mengikuti pelatihan maupun seminar tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Masjid.

3. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Masjid.
2. Mengetahui tugas dan fungsi masing pengurus Badan Kenaziran Masjid
3. Selalu memberikan laporan yang jujur kepada masyarakat agar Akuntabilitas dan pengelolaan Masjid menjadi lebih akuntabel.

4. MANFAAT KEGIATAN

Setelah mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengelolaan masjid yang akuntabel maka diharapkan Badan Kenaziran Masjid sebagai pengurus dapat bekerjasama dengan masyarakat sehingga dapat terjalin Kerjasama yang sama-sama saling mempercayai dan kegiatan ibadah yang dijalankan di Masjid dapat terlaksana dengan sebenarnya.

5. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan pelatihan menyelenggarakan peningkatan kemampuan tentang pengelolaan masjid Al Muslimin yang akuntabel di Kec komunikasi Medan Tuntungan sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima system pengelolaan yang dibuat oleh pengurus Masjid sehingga terjalin hubungan yang baik ditengah tengah masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntansi Dan Teori Islam

(Eliade, 1959), dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2011), menyatakan bahwa, “bagi seorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual”.

Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktek keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktek maupun nilai keagamaan atau spiritual. (Laughlin, 1993) dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2011),

2. Entitas Dan Pengelolaan Yang Baik

Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*Good Governance*) menyebabkan praktek akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktek keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*Trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat (Simanjutak dan Januarsih, 2011).

PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Reformat 2007). Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis.

3. Akuntansi Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk Pengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (Mahmudi, 2005),

4. Clash Of Jurisdictional

Teori Clash of Jurisdictional (Abbot, 1998), dalam (Simanjutak dan Januarsih 2011), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya.

METODE

1. Pengambilan Data

Dalam pengabdian ini menggunakan jenis data internal, yaitu data yang diambil dari dalam tempat dilakukannya pengabdian. Sumber data yang dipakai dalam pengabdian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan.

2. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian langsung ke lokasi pengabdian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui :

- a. Wawancara, yaitu dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan pengabdian.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek pengabdian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data- data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan pengabdian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam pengabdian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul pengabdian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk, pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti

Metode Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan yakni *Logic Analytic*, yakni menyesuaikan berbagai hasil wawancara dari rekaman suara responden dengan teori yang digunakan dalam pengabdian ini. Yakni, Akuntansi dan Teologi, Akuntabilitas dan *Good Governance*, *Clash of Jurisdictional*.

HASIL

1. Sejarah Berdirinya

Sejarah Berdirinya Masjid Al- Muslimin Kelurahan Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Masjid Al- Muslimin pada awal nya sebelum menjadi masjid adalah tanah kosong dengan luas tanah 400 m² yang merupakan pesarean atau kuburan namun sudah dipindah semuanya pada tahun 1997 sedangkan untuk dana pembangunan diperoleh dari warga sekitar dan sebagian besar dibiayai swadaya masyarakat. Pengajuan ijin untuk membangun bangunan masjid itu di ijinakan oleh Bapak Kepala Kementerian agama Republik Indonesia, Bapak Solahuddin Siregar S.Ag, dan kemudian diresmikan penggunaannya sebagai tempat ibadah di Kelurahan Mangga Kec Medan Tuntungan.

2. Struktur Organisasi Masjid Al-Muslimin

Susunan pengurus badan kesejahteraan Masjid Al – Muslimin Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Periode 2021-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Penasihat :
 - a. Drs Syahrudin Siregar MA
 - b. F. Hanzah Siregar
 - c. M. Saleh Yusuf
 - d. Darwis Lubis
2. Ketua Umum : Bapak Ilhamsyah M.Pdi
3. Wakil : Muhammad Yusuf S.Pdi
4. Sekretaris : Darma Putra Sebayang
5. Bendahara : Andrianta Sebayang

6. Bidang Ibadah dan PHBI

Ketua : Muhammad Yusuf S.Pdi

Anggota :

1. Arif Andika
 2. Hafuz Aryo Ramadinan
 3. Rais Abdurahman Siregar
 4. Remaja Mesjid Muslimin
7. Bidang Dana dan Usaha
1. Sofyan Hadi
 2. Marianto
8. Bidang Pemberdayaan Remaja Masjid
- Ketua : Untung Siswoyo
- Anggota :
1. Guswandi
 2. Akbar Kurniawan Sebayang
 3. Bambang Purwanto
9. Bidang Pembangunan Masjid
- Ketua : Syafran Marbun
- Anggota :
1. Suprianto
 2. Supendi
 3. Ribut Budiman
 4. Miswanto
10. Imam Masjid
1. Ilhamsyah M.Pdi
 2. Muhammad Yusuf S.Pdi
 3. Hafiz Aryo Ramadhan
 4. Rais Abdurahman Siregar
11. Muadzin Masjid
1. Aminullah Siregar
 2. Arif Andika
 3. Rais Abdurahman Siregar

3. Akuntansi Di Masjid Dan Teologi Islam

Berkaitan dengan akuntansi, Islam sudah menerapkannya pada masa Rasulullah SAW seperti perhitungan zakat, utang, pencatatan uang masuk dan keluar dalam perdagangan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 mencerminkan bahwa akuntansi dalam islam bukanlah yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan keagamaan menjadi lebih baik seperti di tempat ibadah (Masjid) dan pasar perdagangan. Akuntan dalam entitas tempat ibadah (Masjid) pencatatan lapo keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja para pengurus masjid selaku Takmir dan Bendahara Masjid. Pernyataan senada disampaikan juga oleh Bendahara Masjid, bapak Abdullah Mustafa. "Ilmu akuntansi ya dibutuhkan karena saya di dalam mengelola keuangan masjid menggunakan istilah pembukuan secara tidak langsung mengikuti akuntansi jadi kita mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran tapi sistemnya bulanan bukan sistem kelanjutan atau masih sederhana"

Akuntansi dalam entitas keagamaan seperti dua hal yang tidak memiliki keterkaitan yang baik, bagi orang awam. Namun tak sedikit pula entitas keagamaan yang sudah melakukan pencatatan keuangan dengan metode yang diterapkan seperti pada suatu perusahaan dan lainnya. Asalkan pencatatan tersebut digunakan untuk kemajuan entitas keagamaan dan sebenar-benarnya hal itu menjadi sebuah keharusan. Berkaitan dengan teologi islam sepertinya para pengurus tidak menyatakan dimensi teologi bahwa akuntansi sebagai perintah Allah SWT, tetapi terwujud dalam hal yang berbeda seperti menjadi pengurus tanpa mau di gaji atau hanya bersifat keikhlasan saja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh ketua pengurus, bapak Amano :

“Untuk laporan dan pengelolaan keuangan semua pengurus sampai saat ini tidak ada yang menerima gaji, semua dari istilahnya ke ikhlasan di dalam pengelolaan keuangan itu (sukarela)”.

4. Pengelolaan Keuangan Masjid dan Akuntabilitas Publik di Masjid Al Muslimin

Pencatatan keuangan di Masjid Al Muslimin sangat sederhana ,walaupun bentuk pencatatannya sangat sederhana namun ini dapat menjadi bukti keluar masuknya keuangan masjid. Setiap pengeluaran dan pemasukan ditulis oleh para pengurus masjid jadi cukup menjadi bukti transparansi. Untuk uangnya digunakan untuk pembangunan masjid dan kegiatan para jamaah masjid. Bukti penggunaan uang masjid seperti disampaikan oleh bendara masjid, bapak Abdullah Mustafa. “Penggunaan uang itu disamping untuk pembangunan- pembangunan yang sifatnya kecil atau tidak cukup besar terus sama pemeliharaan seperti listrik tiap bulan, setiap 1-2 tahun ada juga untuk pengecekan pemeliharaan masjid, kegiatan pengajian bapak-bapak dan fi sabilillah untuk orang luar (kegiatan amal)”.

1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principal). Pertanggung jawaban di sampaikan oleh Ketua Pengurus, mengarah pada semua pengurus karena bagaimanapun mereka adalah satu organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan Masjid. Namun bendahara tetap memiliki tugas yang lebih dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan kepada pengurus lain dan juga jama'ah. Seperti yang langsung dikatakan sendiri oleh Ketua Pengurus, Bapak Amano: “Kalau ada kejadian kesalahan yang bertanggung jawab itu di cari dulu pokok permasalahannya apabila dari pengurus seumpama ya itu yang bertanggung jawab adalah pengurus baik itu ketua, bendahara, petugas yang lain atau sekretaris dan untuk kesalahan yang lain keuangan mungkin seperti hilangnya kotak infak kan tidak bisa disalahkan siapa”.

2. Clash of Jurisdictional

Teori Clash of Jurisdictional (Abbot, 1988) dalam (Simanjuntak dan Januarsari, 2011) , menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Dalam pernyataan yang

disampaikan oleh Ketua Pengurus, Bapak Amano: “Untuk sampai saat ini sepengetahuan saya memang belum diperlukan seorang ahli akuntansi dalam pengelolaan keuangan namun untuk laporan-laporan itu sudah sesuai dengan jalur- jalur yang ada jadi termasuk uang masuk, uang keluar, dan saldo sudah di catat oleh bendahara”. Di dalam Masjid Al Muslimin peran akuntansi tidak konsisten di gunakan yang meyebabkan tidak terjadi Clash of Jurisdictional mereka hanya membutuhkan orang yang sukarela membantu mewujudkan praktek akuntansi praktis yang sesuai dengan pengelolaan keuangan masjid di Al Muslimin’.

5. Penerapan Nilai-Nilai Islam Di Dalam Masjid Al-Muslimin

Penerapan nilai-nilai islam dalam akuntabilitas di masjid tertuju pada nilai yaitu amanah, ikhlas, bertanggung jawab dan bekerja sama.

1. Amanah

Menurut tim sendiri amanah yang dilakukan di masjid Al Muslimin’ seperti tidak mempergunakan uang masjid dari infak dan donatur masjid untuk kepentingan pribadi, mempergunakan peralatan yang ada di masjid sesuai kebutuhan kegiatan masjid, menjaga alat-alat kelengkapan masjid sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Mustafa selaku bendahara masjid : “Penggunaan uang itu disamping untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya kecil atau tidak cukup besar terus sama pemeliharaan seperti listrik tiap bulan, setiap 1-2 tahun ada juga untuk pengecekan pemeliharaan masjid, kegiatan pengajian bapak-bapak dan fi sabilillah untuk orang luar (kegiatan amal)”.

2. Ikhlas

Para pengurus di Masjid Al Muslimin’ juga telah menerapkan nilai ke-ikhlasan dalam melakukan tanggung jawab yang dierikan tanpa adanya imbalan dalam mengelola. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Mustafa selaku bendahara masjid : “Oh tidak, keikhlasan saja. Gini ya mas kalau masalah penggajian meskipun ini uangnya banyak lain dengan masjid lain seperti sini yang saya tahu Masjid Agung, Kauman, dan masjid-masjid besar lainnya itu ada gajinya meskipun berapa tapi kalau disini tidak ada”.

3. Tanggung Jawab

Para jamaah juga bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh para pengurus masjid. Terbukti dari pernyataan yang telah disampaikan dari hasil wawancara. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Amano selaku pengurus masjid : “Untuk akses jamaah ya mas yang kita tahu pengelolaan keuangan itu dari papan keuangan yang ada di masjid biasanya disana dicantumkan berapa pemasukan, pengeluaran, kemudian saldo setiap bulannya”.

4. Bekerjasama

Nilai bekerjasama telah diterapkan oleh para pengurus masjid Al Muslimin’ dalam mengelola masjid dan saat ada masalah yang terjadi di masjid seperti saat hilangnya kotak infa’, para pengurus tidak saling menyalahkan satu sama lain siapa yang bertanggung jawab atau menuduh

satu sama lain, tetapi bermusyawarah bersama mencari solusi supaya tidak terjadi kehilangan kotak infak dan masalah yang lain. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Amano selaku ketua pengurus bila terjadi masalah : “Kalau ada kejadian kesalahan yang bertanggung jawab itu di cari dulu pokok permasalahannya apabila dari pengurus seumpama ya itu yang bertanggung jawab adalah pengurus baik itu ketua, bendahara, petugas yang lain atau sekretaris dan untuk kesalahan yang lain keuangan mungkin seperti hilangnya kotak infak kan tidak bisa disalahkan siapa”.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Akuntansi dalam pengelolaan keuangan Masjid disadari oleh para pengurus Masjid memiliki peran yang sangat penting. Walaupun metode pencatatan laporan keuangan yang dipakai masih sederhana (contoh laporan keuangan tersebut disajikan dalam lampiran), namun pencatatan tersebut sebagai bukti aliran kas Masjid dan juga sebagai bukti kinerja para pengurus dalam bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan semua jama'ah dapat memahami catatan yang dibuat dan menghindarkan dari berbagai hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Masjid juga harus berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat. Terkait dengan potensi ekonomi masjid, sekarang ada beberapa unit usaha jamaah masjid yang antara lain adalah koperasi Simpan Pinjam antar pengurus dan arisan Jamaah Majelis Taklim.
- b. Model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus Masjid yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Walaupun pencatatannya masih sederhana namun dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus terutama terhadap bendahara, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik sudah dijalankan oleh Para Pengurus Masjid Al Muslimin'.
- c. Clash of Jurisdictional tidak terjadi di dalam Masjid Al Muslimin' di dalam Masjid Al Muslimin peran akuntan tidak konsisten di gunakan yang meyebabkan tidak terjadi Clash of Jurisdictional mereka hanya membutuhkan orang yang sukarela membantu mewujudkan praktek akuntansi praktis yang sesuai dengan pengelolaan keuangan masjid di Al Muslimin' dan yang lebih utama mereka lebih mementingkan aspek kepercayaan untuk mengelola keuangan masjid dengan baik sudah cukup daripada keahlian seorang akuntan dalam mengelola keuangan masjid.

2. Saran-saran

- a. Mendorong para pengurus masjid untuk membuat bentuk metode pengelolaan lebih baik dan detail yang mudah di pahami oleh semua pihak yang bersangkutan seperti para pengurus masjid dan jamaah masjid.

- b. Tetap menjaga Amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada para jamaah masjid dengan mengelola keuangan masjid secara transparan dan akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan apa saja yang telah dilakukan para pengurus masjid.
- c. Bukti bahwa Clash of Jurisdictional tidak terjadi di dalam Masjid Al Muslimin karena mereka tidak begitu membutuhkan peran seorang akuntan dalam berperan mengelola keuangan Masjid Al Muslimin' lebih maksimal. Dibutuhkan kesadaran dan perubahan peran sosial akuntansi sebagai alat yang dapat mendorong perubahan sosial, dan peningkatan kemanfaatan akuntansi pada berbagai entitas yang hadir dalam lingkungan sosial khususnya dalam pengabdian ini tempat ibadah (Masjid).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbott, *The System of Professions: An Essay of the Division of Expert Labour*. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1988.
- D. A. Simanjuntak and Y. Januarsi, "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid," *Simp. Nas. Akunt. XIV Aceh 2011, Fak. Ekon. Univ. Syiah Kuala Banda Aceh*, pp. 21–22, 2011.
- J. Silvia, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomologis Pada Gereja Protestan Indonesia Dongala Jemaat Manunggal Palu)," *Symp. Nas. Akunt. XIV Aceh*, pp. 1–25, 2011.
- I. Bastian, *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- L. . Moleong, *Metodologi Pengabdian Kualitatif*, Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance," (*Jurnal Akunt. Pemerintahan*), vol. 2, 2006.
- M. Eliade, *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*. New York, NY., 1959.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.